



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Yohanes Oktovianus, MM**

Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 20 Februari 2024

Pihak Kedua,

**Ayodhia G. L. Kalake**

Pihak Pertama,

**Ir. Yohanes Oktovianus, MM**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Perencana Ahli Muda	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI		TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum Pembaruan Kebangsaan dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan.	97.87 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah Partai Politik, Ormas FPK, SMA/SMK yang teilbat}}{\text{Jumlah target lembaga}} \times 100\%$	
2	Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur.	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik.	100 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah Partai Politik dan SMA/SMK yang teilbat}}{\text{Jumlah target lembaga}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi.	Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	44.9 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah Partai Politik dan SMA/SMK yang teilbat}}{\text{Jumlah target lembaga}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya.	75 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan}}{\text{Jumlah target laporan}} \times 100\%$	
5	Terlaksananya Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.	81.13 %	100 %	$\frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan}}{\text{Jumlah target laporan}} \times 100\%$	

## B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
<b>1</b>	<b>APBD</b>		
	<b>a) Belanja (program)</b>	Rp. 327.399.711.888,-	<b>Realisasi minimal 85%</b>
1.	Penujiang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 5.649.270.478,-	Realisasi minimal 90%
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.460.000.010,-	Realisasi minimal 90%
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 317.712.131.400,-	Realisasi minimal 90%
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 216.924.000,-	Realisasi minimal 90%
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 381.286.000,-	Realisasi minimal 90%
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 980.100.000,-	Realisasi minimal 90%
	<b>b) Pendapatan</b>	Rp. 15.000.000,-	<b>Realisasi minimal 90%</b>
	<b>Jumlah Belanja + Pendapatan</b>	Rp. 327.414.711.888,-	<b>Realisasi minimal 90%</b>
<b>2</b>	<b>APBN</b>		
	<b>a) Program Dekonsentrasi</b>	Rp. -	-
	<b>b) Tugas Pembantuan</b>	Rp. -	-
	<b>Jumlah Dekonsentrasi+Tugas Pembantuan</b>	Rp. -	-




- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
  - 1. TL rekomendasi tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
  - 2. TL rekomendasi dibawah tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);  
N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 20 Februari 2024



Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,

  
Ayodhia G. L. Kalake

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

  
Ir. Yohanes Oktovianus, M.M

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Perencana Ahli Muda	